

PESANTREN DI SULAWESI UTARA (Analisis Kritis Sistem Pendidikannya)

DR. Adri Lundeto, M.Pd.I.⁶⁹

Musdalifah Dachrud, S.Psi., M.Si.⁷⁰

ABSTRACT

Islamic Boarding School is a qualified educational institution in bearing educated generation who are both intellectual and religious since it is sustained by characteristic educational system applied in it. The characteristic implied in its educational system application in both institutional and organizational aspects, leadership, curriculum, educator, and learner. This research aims at finding out the description about the existence and the implement of Islamic Boarding School educational system in North Sulawesi, support and obstacle factors of Islamic Boarding School educational system and alternative solution to anticipate the obstacle factor of Islamic Boarding School educational system which in turn figuring out the solution of obstacle factor of Islamic Boarding School educational system in North Sulawesi.

This research is a field research which is qualitative descriptive in nature taken place at four Islamic Boarding School in North Sulawesi namely; Pesantren Lem-baga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan Manado, Pesantren Alkhairaat Bintauna, Pesantren Hidayatullah Bitung, dan Pesantren Assalam Manado. The data is collected through field observation at the prior then by semi structural interview. Another data is collected through documentation photo by the researcher and theoretical frame work is collected through library research. The data collection is followed by writing, editing, classifying, reduction and presenting the data to be analyzed. The data analysis toward finding result is done by using normative theological approach, pedagogical approach, sociological and historical approach.

The research finding related to Islamic Boarding School educational system in North Sulawesi regards to the following: first, Islamic Boarding School in North Sulawesi is a system based namely collective leadership; second,

⁶⁹ Dosen dan Peneliti di bidang pendidikan pada STAIN Manado

⁷⁰ Dosen dan Peneliti di bidang pendidikan pada STAIN Manado

supporting factor consists of public support, government support, and alumni support. Obstacles factors consist of institutional and organizational aspects which based on system, leadership aspect characterized by laisses faire, adaptive curriculum aspect, educator aspect who are mostly from public not Islamic Boarding School as their educational background, learner aspect who mostly live outside of school; third, the solution to solve obstacle factor in Islamic Boarding School educational system in North Sulawesi is through ordering and structuring Islamic Boarding School management well, forming of leader cadres, formulating Islamic Boarding School curriculum to be a characteristic in Islamic Boarding School, Improving educator quality, seeking for facility and equal program in order that the learners are attracted to stay in the school.

This research finding implied to some components related to Islamic boarding school educational system in North Sulawesi namely: first, organizational and institutional aspects which will have to rearrange its organizational management to be better to enable to produce qualified output; second, leadership aspect which has to think of leader cadres regeneration in order that Islamic Boarding School Institution could keep running well; third, curriculum aspect, will have to be rearranged well as soon as possible to be able to reflect preeminent Islamic Boarding School characteristics; fourth, educator aspect, tried to be always improved their quality in any aspects to support teaching and learning process at the school, including trying to stay with the learner at the school; fifth, learner aspect which always develop their whole potential either physical or psychological as main grade both in worldly life and hereafter.

A. PENDAHULUAN

Pesantren dalam struktur pendidikan nasional, merupakan mata rantai pendidikan yang sangat penting. Hal ini tidak hanya karena sejarah kemunculannya yang relatif lama, melainkan pesantren telah secara signifikan ikut andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam sejarahnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat (*society based education*). Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 30 ayat 1, bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷¹

⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 21.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 55 ayat 1 bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.⁷²

Istilah pesantren atau pondok pesantren telah dibakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.⁷³

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat lainnya mengatakan bahwa pesantren baru muncul pada masa walisongo dan Maulana Malik Ibrahim yang dipandang sebagai orang pertama yang mendirikan pesantren. Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa, sebelum datangnya agama Islam, telah ada lembaga pendidikan Jawa kuno yang praktek kependidikannya sama dengan pesantren. Lembaga pendidikan Jawa kuno itu bernama *pawiyatan*. Di lembaga tersebut tinggal Ki Ajar dengan Cantrik. Kedua kelompok ini tinggal di satu komplek dan di sini terjadilah proses pembelajaran.⁷⁴

Penganalogian pendidikan *pawiyatan* ini dengan pesantren, sebetulnya tidak terlalu sulit untuk menetapkan bahwa pesantren itu telah tumbuh sejak awal perkembangan Islam di Indonesia khususnya di Jawa. Sebab model pendidikan pesantren itu telah ada sebelum Islam masuk yaitu model *pawiyatan*. Dengan masuknya Islam, maka sekaligus diperlukan sarana pendidikan, tentu saja model *pawiyatan* ini dijadikan acuan dengan mengubah sistem yang ada ke sistem pendidikan Islam.

Kenyataan yang dapat dilihat sekarang adalah bahwa harapan-harapan masyarakat muslim untuk menjadikan lembaga pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan utama, menjadi kurang diminati. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, sebagaimana disebutkan oleh Nurcholish Madjid.⁷⁵ Alasan tersebut antara lain, terletak pada lemahnya visi dan tujuan yang dianut oleh pesantren. Agaknya tidak banyak pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikannya dan menuangkannya dalam tahapan-tahapan rencana kerja atau program. Tidak adanya perumusan tujuan itu disebabkan pada proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh seorang kiai atau bersama-sama para pembantunya secara intuitif yang disesuaikan dengan perkembangan pesantrennya. Pesantren pada dasarnya merupakan pancaran

⁷²*Ibid.*, h. 26.

⁷³Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 429.

⁷⁴Lihat Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 21.

⁷⁵*Ibid.*, h. 6.

semangat dan kepribadian dari pendirinya. Tidaklah mengherankan jika muncul anggapan bahwa hampir semua pesantren itu merupakan hasil usaha pribadi atau individu dari pendirinya.

Berdasarkan fenomena di atas, dunia pesantren mulai terbuka untuk menerima adanya konflik dan tentunya harus dikelola sebaik mungkin agar memperoleh keuntungan-keuntungan bagi komunitas pesantren secara keseluruhan. Konflik dalam suatu kelompok dapat bernilai positif untuk menghidupkan norma-norma yang sudah ada atau memunculkan norma-norma baru yang disepakati bersama.⁷⁶ Sebagai sistem terbuka, pesantren memiliki peluang besar untuk gagasan-gagasan pembaruan yang berawal dari serangkaian konflik. Oleh sebab itu, semestinya menjadi harapan bagi para pengasuh pesantren untuk menjadikan konflik sebagai sebuah proses pembelajaran demi kemajuan sebuah organisasi dan bukanlah sebaliknya.

Permasalahan-permasalahan pesantren tersebut, merupakan akumulasi dari berbagai komponen yang ada di dalam pesantren, yang satu dengan lainnya saling menunjang. Apabila terdapat kelemahan salah satu komponennya dan komponen yang lainnya tidak mampu menutupi kelemahan tersebut, maka bisa jadi satu komponen inilah yang akan menjadi penyebab ketertinggalan dan bahkan kemunduran sebuah organisasi seperti pesantren. Berbagai permasalahan yang telah diungkapkan terdahulu, adalah merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia, termasuk pesantren-pesantren yang ada di Sulawesi Utara, sebagai obyek penelitian peneliti.

Peneliti tertarik untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi pesantren-pesantren di Sulawesi Utara, terutama dari sisi sistem pendidikan, yang secara langsung akan mengungkapkan sisi-sisi lainnya yang terkait erat dengan pembahasan tentang sistem pendidikan tersebut. Peneliti lain juga pernah melakukan penelitian tentang pesantren, namun penelitian tersebut hanya bersifat parsial, dengan mengungkapkan salah satu item sistem yang ada dalam sebuah pesantren, misalnya hanya mengangkat tentang kurikulum atau tenaga pendidik saja. Penelitian tentang sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara secara totalitas hingga saat ini belum pernah dilakukan.

Alasan lain yang dapat peneliti kemukakan adalah judul ini masih kurang yang membahas dalam lingkup pesantren di Sulawesi Utara, tenaga pendidik banyak yang berlatar belakang pendidikan umum dan non-pesantren, santri yang dimiliki setiap pesantren sangat sedikit, tidak mencapai angka 500 santri. Alasan lain yang juga sangat menarik adalah posisi pesantren yang berada di tengah-tengah masyarakat non-Muslim yang tetap menampakkan eksistensinya.

⁷⁶Lihat H.M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren* (Cet. III; Jakarta: Diva Pustaka, 2008), h. 58.

Pesantren yang terdapat di Sulawesi Utara, terdiri dari 15 buah pesantren, yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota. Pesantren-pesantren tersebut tumbuh dan berkembang di Sulawesi Utara sejak tahun 1975 hingga sekarang. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010, pesantren yang terbanyak santrinya adalah Pesantren Assalaam Bailang Manado, dengan jumlah santri 245 orang. Disusul kemudian Pesantren *Dār al-'Ulūm* Kotamobagu dengan jumlah santri 240 orang, yang sekarang sudah beralih status menjadi sekolah negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana eksistensi pesantren di Sulawesi Utara dilihat dari sistem pendidikannya? Untuk memudahkan pembahasan, peneliti merinci masalah pokok tersebut dalam beberapa submasalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana realitas faktor pendukung dan penghambat sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara?
3. Bagaimana solusi mengantisipasi faktor penghambat sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara?

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelusuran terhadap sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara, dengan mengambil sampel 4 buah pesantren dari 15 pesantren yang ada, yakni pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan (LPI- PKP) Manado, pesantren Alkhairaat Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pesantren Assalaam Manado dan pesantren Hidayatullah Bitung.

Aspek-aspek sistem pendidikan pesantren yang diteliti, dibatasi pada lima aspek, yakni: Kelembagaan dan Keorganisasian, Kepemimpinan, Kurikulum, Pendidik/*Ustādz*, Peserta Didik/Santri.

Kajian tentang pesantren di Indonesia, sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik dalam negeri maupun luar negeri. Data primer tentang pesantren, baru diperoleh secara lengkap dari beberapa pesantren yang menjadi objek penelitian, seperti pesantren *Al-Falāh* di Pagentongan (Bogor) yang analisisnya termuat dalam buku Profil Pesantren. Data berskala kecil itu tidak cukup melandasi kebijaksanaan berskala luas yang menyangkut semua pesantren.

Demikian pula literatur lain tentang pesantren yang bersifat amat terbatas. Selain beberapa puluh artikel yang dimuat diberbagai media, seperti yang didaftar oleh M. Amin Mansur dalam sebuah bibliografi kecil yang disusunnya atas biaya LIPI dalam tahun 1976, baru ada beberapa karya tulis lain berbentuk buku atau artikel ilmiah yang panjang tentang pesantren.

Selain artikel dalam *The Encyclopaedia of Islam*, terdapat pula deskripsi C. Geertz tentang pesantren dalam bukunya *The Religion of Java* tahun 1960, tulisan

Lance Castles tentang pondok modern Gontor Ponorogo, buku kumpulan tulisan, Pesantren dan Pembaruan yang diedit oleh M. Dawam Rahardjo tahun 1974, buku Karel Steenbrink, Pesantren, Madrasah and *School* tahun 1974, disertasi tentang pesantren yang diajukan oleh M. Hafiz Dasuki di Universitas McGill, termasuk disertasi yang ditulis oleh Zamakhsyari Dhofier dengan judul *Tradisi Pesantren* yang diterbitkan oleh LP3ES, tahun 1982.

Peneliti lain yang membahas tentang pesantren adalah Muljono Damopolii. Tulisan tersebut adalah disertasi yang berjudul “*Pembaruan Pendidikan Islam di Makassar (Studi Kasus Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM Tamalanrea Makassar)*”, yang telah diterbitkan oleh Rajawali Pers tahun 2011 dalam bentuk buku berjudul “*Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*” dan menghasilkan temuan beberapa aspek yang terkait dengan sistem pendidikan pesantren, antara lain; 1) komponen tujuan pendidikan pesantren bersifat dinamis, 2) komponen kelembagaan dan keorganisasian pesantren bercorak transformatif, 3) komponen kurikulum pesantren bercorak fleksibel, 4) komponen metodologi pengajaran bercorak eklektik-inovatif, dan 5) komponen tenaga pengajar bercorak professional.

Namun, dari sekian banyak penelitian dan tulisan tentang pesantren tersebut, peneliti belum menemukan tulisan yang mengangkat tentang sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara secara total, dan mencerminkan kondisi pesantren yang ada di Sulawesi Utara. pesantren yang ada di Sulawesi Utara sudah ada sejak tahun 1975, yakni Pesantren Darul Ulum yang beralamat di Kotamobagu Barat, yang sekarang sudah beralih status menjadi sekolah negeri. Selanjutnya diikuti dengan berdirinya beberapa pesantren yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan gambaran pelaksanaan sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara; 2) Mengetahui dan mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara; 3) Menganalisis dan merumuskan solusi alternatif faktor penghambat sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara.

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian: 1) Kegunaan Teoretis, diharapkan hasil penelitian ini memiliki nilai akademik yang dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pendidikan Islam pada khususnya; 2) Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pesantren di Sulawesi Utara sebagai lembaga pembangun generasi muda yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia, untuk melakukan pengembangan pesantren.

B. MENGENAL SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN

1. Sistem Pendidikan Pesantren

Kata sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁷⁷ Rumusan lain mengatakan bahwa sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁷⁸ Fuad Ihsan menyebut istilah sistem berasal dari bahasa Yunani ‘*sistema*’ yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu ke-seluruhan.⁷⁹ Dengan demikian, sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang sama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata *paedagogie* (Yunani), terdiri dari kata ‘*pais*’ artinya anak, dan ‘*again*’ diterjemahkan sebagai membimbing. Jadi, *paedagogie* yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak.⁸⁰

Secara definitif pendidikan (*paedagogie*) diartikan oleh para tokoh pendidikan sebagai berikut:

- a. John Dewey; pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.
- b. Langeveld; mendidik adalah mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang disadari dan dilaksanakan dengan sengaja antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa.
- c. Hoogeveld; mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri.
- d. S.A. Bratanata; pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan.
- e. Rousseau; pendidikan adalah memberi perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, tetapi dibutuhkan pada waktu dewasa.

⁷⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1076.

⁷⁸Lihat Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Edisi Pertama (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 47.

⁷⁹Lihat H. Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 107.

⁸⁰H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 69.

- f. Ki Hajar Dewantara; mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.⁸¹
- g. Ahmad D. Marimba; pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁸²

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸³

Pendidikan bukanlah sekedar membuat peserta didik menjadi sopan, taat, jujur, hormat, setia, sosial dan sebagainya. Tidak juga hanya bermaksud membuat mereka mengetahui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mampu mengembangkannya. Mendidik adalah membantu peserta didik dengan penuh kesadaran, baik dengan alat atau tidak, dalam kewajiban mereka mengembangkan dan menumbuhkan diri untuk meningkatkan kemampuan serta peran dirinya sebagai individu, anggota masyarakat dan umat Tuhan. Mendidik adalah semua upaya untuk membuat peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi dan potensi-potensi lainnya secara optimal ke arah yang positif.

Pesantren berasal dari kata pe-santri-an yang berarti tempat tinggal para santri. Santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji; ada juga yang mengartikan dengan *shastri* dari bahasa India yang berarti orang yang tahu dan paham dengan kitab suci; ada juga yang memahami santri dari *sant* artinya manusia baik, *tra* artinya suka menolong, sehingga kata pesantren diartikan tempat pendidikan manusia-manusia baik.⁸⁴

Penelitian ini menggunakan istilah pesantren, dan didefinisikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal 1 ayat (4) sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Lihat Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 3.

⁸³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 2.

⁸⁴ Lihat H. Amiruddin Nahrawi, *Pembaruan Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 18.

Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.⁸⁵

Lembaga pendidikan keagamaan Islam lebih rinci lagi disebutkan pada pasal 14 ayat (1-3) sebagai berikut:

Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren (ayat 1). Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal (ayat 2). Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal (ayat 3).⁸⁶

Adapun istilah pendidikan diniyah yang disebutkan di atas berarti pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.⁸⁷ Jalur pendidikan yang dimaksud adalah jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, sedangkan jenjang pendidikan formal yang dimaksud adalah jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Adapun jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.⁸⁸ Penjelasan lebih lanjut mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan tersebut, dapat dilihat pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13, 14, 15 dan 16.

Sistem pembelajaran di pesantren pada awalnya dikenal ada dua macam, yakni *weton* dan *sorogan*. *Weton* adalah bentuk pembelajaran yang kiai membaca sesuatu kitab dalam waktu tertentu dan santri dengan membawa kitab yang sama mendengarkan dan menyimak bacaan kiai itu. Dalam sistem pengajaran yang semacam ini, tidak dikenal adanya absensi. Santri boleh hadir dan boleh juga tidak hadir. Dalam sistem pembelajaran ini tidak dikenal adanya ujian. Apakah para santri itu memahami apa yang dibaca kiai atau tidak, hal itu tidak bisa diketahui. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di pesantren itu adalah bebas, bebas untuk belajar dan bebas untuk tidak belajar.⁸⁹

⁸⁵Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 429.

⁸⁶*Ibid.*, h. 434. Istilah pendidikan formal, nonformal dan informal, dapat dilihat pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 11-13 sebagai berikut: Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. *Ibid.*, h. 99.

⁸⁷*Ibid.*, h. 429.

⁸⁸*Ibid.*, h. 104.

⁸⁹Lihat H.A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), h. 19.

Santri yang sudah merasa mampu dalam sistem pembelajaran ini, mengadakan bimbingan/pengajaran yang diikuti oleh santri-santri lain yang lebih muda. Inilah sebabnya ukuran kepandaian santri itu bukan terletak pada pelajaran-pelajaran apa dan kitab-kitab apa yang sudah dipelajari dari kiai, tetapi pelajaran-pelajaran apa dan kitab-kitab apa yang telah berani diajarkannya. Inilah pencerminan *group dynamic* yang dilahirkan dari sistem pengajaran ini di pesantren.

Sorogan (Jawa: menyodorkan) adalah bentuk atau metode pembelajaran santri yang bersifat individual, santri menghadap kiai, seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya yang kemudian disodorkan kepada kiai, lalu santripun diajari dan dibimbing bagaimana cara membacanya, menghafalkannya atau lebih jauh lagi menerjemahkan dan menafsirkannya. Semua itu dilakukan sementara santri menyimak penuh perhatian dan memberi catatan pada kitabnya atau mensahkan bahwa ilmu itu telah diberikan kepadanya.⁹⁰

Berikut ini dikemukakan rumusan tentang sistem pendidikan pesantren yang oleh Mujamil Qomar, bahwa sistem pendidikan pesantren, ada yang bersifat independen dan ada pula yang bersifat adaptif. Maksud dari Sistem pendidikan independen adalah bahwa pesantren memiliki karakter plural, tidak seragam dan tidak memiliki wajah tunggal (*uniform*). Pluralitas pesantren ditunjuk-kan antara lain oleh tidak adanya aturan yang mengatur tentang manajerial, administrasi, birokrasi, struktur, budaya, kurikulum, termasuk pemihakan politik yang dapat mendefinisikan pesantren menjadi tunggal, kecuali aturan itu datang dari pemahaman agama yang terefleksikan dalam berbagai kitab kuning atau kitab-kitab terdahulu.⁹¹

Sistem pendidikan adaptif adalah sistem pendidikan yang memadukan antara sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan formal.⁹² Melalui sistem pendidikan adaptif ini, perubahan-perubahan akan terlihat dalam sebuah proses pendidikan di pesantren. Perubahan sistem ini menimbulkan perubahan pada berbagai aspek yang erat kaitannya dengan sistem pendidikan, utamanya aspek materi dan metode pengajarannya. Materi pengajaran telah banyak menempuh kurikulum campuran antara pelajaran agama dan umum. Kurikulum campuran ini timbul dari tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum yang merupakan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi para lulusan pesantren. Demikian juga sistem pengajaran yang berpusat pada kiai mulai ditinggalkan. Pihak pesantren umumnya merekrut lulusan-lulusan perguruan tinggi, terutama dari perguruan tinggi Islam, menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pesantren.

Beberapa uraian yang membahas tentang sistem pendidikan pesantren seperti dijelaskan di atas, dipertegas kembali dengan menyebutkan definisi tentang sistem

⁹⁰M. Natsir Arsyad, *Seputar Al-Quran, Hadis dan Ilmu* (Jakarta: Al-Bayan, t.th), h. 111.

⁹¹Lihat Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi*, *op. cit.*, h. 67.

⁹²Lihat *Ibid.*, h. 81.

pendidikan pesantren yang disebutkan oleh M. Arifin sebagai berikut: Sistem pendidikan pesantren adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren.⁹³

Unsur-unsur sistem pendidikan pesantren menurut Mastuhu dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) aktor/pelaku; seperti kiai, santri, 2) sarana perangkat keras; seperti masjid, asrama atau pondok, rumah kiai dan sebagainya, 3) sarana perangkat lunak; seperti tujuan, kurikulum, metodologi pengajaran, evaluasi dan alat-alat pendidikan lainnya.⁹⁴ Zamakhsyari Dhofier menyebutkan elemen-elemen penting yang terdapat dalam kesatuan sistem pendidikan pesantren adalah: 1) pondok, 2) masjid, 3) pengajian kitab-kitab Islam klasik, 4) santri, dan 5) kiai.⁹⁵ Sejalan dengan ungkapan Zamakhsyari Dhofier tersebut, Mustofa Syarif menyebutkan pula ada lima unsur dalam pesantren; kiai, santri, masjid, pondok (asrama dan pengajian).⁹⁶ Ada yang tidak menyebut unsur pengajian, tetapi meng-gantinya dengan unsur ruang belajar, aula atau bangunan-bangunan lain.⁹⁷

Unsur-unsur pesantren berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besar kecilnya pesantren tersebut.⁹⁸ Untuk pesantren kecil, unsur-unsurnya cukup kiai, santri, asrama atau pondok, kitab-kitab keagamaan dan metode pengajaran. Akan tetapi untuk pesantren besar, perlu ditambahkan dengan unsur-unsur lain, seperti ustadz sebagai pembantu kiai dalam proses pengajaran, gedung sekolah/madrasah, pengurus, tata tertib dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pesantren.

Secara garis besar, lembaga pesantren dapat digolongkan menjadi dua tipologi, yaitu tipe pesantren *salafi* dan tipe pesantren *khalafi*. Pesantren *salafi* yaitu pesantren yang tetap mempertahankan sistem (materi pengajaran) yang sumbernya kitab-kitab klasik Islam atau kitab dengan huruf Arab gundul (tanpa baris apapun). Sistem *sorogan* (individual) menjadi sendi utama yang diterapkan. Pengetahuan non agama tidak diajarkan. Sedangkan Pesantren *Khalafi* yaitu pesantren yang me-nerapkan sistem madrasah yaitu pengajaran secara klasikal, dan memasukkan pengetahuan umum serta

⁹³M. Arifin, *op. cit.*, h. 257.

⁹⁴Mastuhu, "Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren", *Disertasi* (Bogor: Fakultas Pascasarjana IPB, 1989), h. 56.

⁹⁵Zamakhsyari Dhofier, *op. cit.*, h. 44.

⁹⁶Mustofa Syarif, *et al.*, *Administrasi Pesantren* (Jakarta: PT. Paryu Barkah, t.t.), h. 6.

⁹⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren* (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepala Pondok Pesantren, 1986), h. 31.

⁹⁸Zamakhsyari Dhofier membuat kalsifikasi pesantren dengan kategori pesantren kecil, sedang dan besar. Pesantren yang tergolong kecil biasanya mempunyai jumlah santri di bawah seribu orang dan pengaruhnya terbatas pada tingkat kabupaten. Pesantren menengah biasanya mempunyai jumlah santri antara 1.000 sampai dengan 2.000 orang, memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa kabupaten. Pesantren besar biasanya memiliki santri lebih dari 2.000 orang yang berasal dari berbagai kabupaten dan provinsi. Beberapa pesantren besar memiliki popularitas yang dapat menarik santri-santri dari seluruh Indonesia. lihat Zamakhsyari Dhofier, *Ibid.*

bahasa non-Arab dalam kurikulum, bahkan menambah-kannya dengan berbagai keterampilan.⁹⁹

Menggambarkan tujuan pendidikan pesantren secara pasti dan seragam memang sangatlah sulit. Hal ini disebabkan karena pesantren mempunyai kebiasaan untuk tidak memandang penting merumuskan dasar dan tujuan pendidikannya secara eksplisit. Hal ini juga karena sifat kesederhanaan pesantren, sesuai dengan dorongan berdirinya. Sang kiai mengajar dan santri belajar, semata-mata untuk ibadah kepada Allah swt., dan tidak pernah dihubungkan dengan tujuan tertentu dalam lapangan kehidupan atau tingkat jabatan tertentu dalam hirarki sosial.

2. Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mampu mengamalkannya, sehingga bermanfaat bagi dirinya, agama, masyarakat dan negara. Tujuan pendidikan pesantren lebih lanjut yang dijadikan acuan baku dalam penelitian ini, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal 26 ayat (1) sebagai berikut:

Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., berakhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat.¹⁰⁰

Beberapa rumusan mengenai tujuan pendidikan pesantren yang telah disebutkan di atas dapatlah dijadikan barometer untuk setiap pesantren dalam merumuskan setiap visi dan misi lembaganya. Tujuan pendidikan pesantren dalam bentuk visi dan misi tersebut dapat dirumuskan pada hal-hal sebagai berikut: *pertama*, membangun masyarakat melalui pendidikan; *kedua*, menjadikan pesantren sebagai basis dakwah islamiyah; dan *ketiga*, mempersiapkan generasi muda muslim dengan membekali mereka pengetahuan agama dan pengetahuan umum.

⁹⁹Lihat Marno, *Islam By Management and Leadership, Tinjauan Teoretis dan Empiris Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), h. 95.

¹⁰⁰Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *op. cit.*, h. 438.

3. Manajemen Pendidikan Pesantren

Manajemen berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *manus* yang berarti tangan, dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut kemudian menjadi kata kerja *manager* yang artinya menangani.¹⁰¹ *Managere* selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *mana-gement*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Berdasarkan pengertian tersebut, manajemen diartikan juga dengan pengelolaan. Sedangkan dalam bahasa Arab manajemen disamakan maknanya dengan kata *tadb³r* atau *idārah* yang bisa pula berarti administrasi.¹⁰²

Jika dilihat dari aspek terminologi, pada dasarnya manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁰³ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Louis A. Allen bahwa manajemen merupakan suatu seni, suatu ilmu dan suatu profesi. Dikatan suatu seni karena manajemen adalah keterampilan yang dilatih sesuai dengan kepribadian masing-masing praktisi, demikian juga ia mempunyai ciri-ciri sebagai pengetahuan dan ia menjadi suatu pekerjaan spesialisasi dengan mempergunakan pengetahuan yang terklasifikasi.¹⁰⁴

Istilah manajemen pendidikan muncul secara bersama dalam sebuah perluasan konteks sosial. Seorang sarjana misalnya, pergi bekerja ke tempat yang jauh, dalam organisasi-organisasi sektor publik. Para sarjana ini berharap mampu memberikan kontribusi nilai, menghasilkan keuntungan dari hal-hal yang berhubungan dengan disiplin pendidikannya, organisasi maupun masyarakat. Kenyataan inilah yang mengharuskan para penyelenggara program pendidikan untuk merespon tuntutan sosial tersebut dengan menyediakan pendidikan yang relevan dengan kompetitif.¹⁰⁵

Menurut Bush, manajemen pendidikan adalah suatu bidang kajian dan praktek yang berkaitan dengan operasional dari organisasi pendidikan. Tidak ada satu definisi yang diterima secara umum dari bidang kajian ini sebab manajemen pendidikan merupakan pengembangan yang dibuat atas banyak bidang disiplin ilmu mencakup sosiologi, politik dan ekonomi.¹⁰⁶

Konteks manajemen pendidikan pesantren yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suatu kegiatan atau aktifitas memadukan seluruh aspek dan komponen pesantren

¹⁰¹Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3.

¹⁰²Azhar Arsyad, *et al.*, *Pengantar Manajemen* (Makassar: Alauddin Press, 2007), h. 4.

¹⁰³Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), h. 5.

¹⁰⁴Louis A. Allen, *The Management Profession*, terjemahan D.P.Tampubolon (Jakarta: Erlangga, 1964), h. 10.

¹⁰⁵Philip Hallinger & Edwin M. Bridges, *A Problem-based Approach for Management Education: Preparing Managers for Action* (Netherland: Springer, 2007), h. 8.

¹⁰⁶Tony Bush, *Theories of Educational Management* (London: Harper & Row Publishers, 1986), h. 87.

agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan dan target pesantren yang telah dicanangkan sebelumnya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus.

Pengelolaan manajemen pesantren dengan model pengelolaan integral, dalam prakteknya tidak mengalami kendala. Pesantren akan mudah melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan; sebab unsur-unsur manajemen dalam pesantren sudah terbiasa melakukan segala sesuatunya secara kolaboratif. Kolaborasi yang dimaksud bukan sekedar berarti setiap komponen manajemen pada masing-masing unit dalam pesantren dapat mengaktualisasikan diri mereka sesuai dengan keahlian-nya masing-masing. Namun yang terpenting dalam sebuah pengelolaan manajemen yang baik dalam pesantren adalah semua urusan dilakukan dalam suasana keber-samaan dan saling mendukung.

Manajemen sangat dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua kegiatan yang dilaksanakan akan tidak terpola dan tidak teratur, bahkan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Setidaknya ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen. Dalam kaitannya dengan pen-didikan pesantren, maka manajemen dibutuhkan untuk:

- a. Membantu mengarahkan pencapaian tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren. Manajemen pendidikan ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Membantu menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dalam proses pendidikan yang terjadi dalam pesantren. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari santri yang sangat beragam, termasuk kiai dan masyarakat.
- c. Manajemen diarahkan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.¹⁰⁷

Sebelum membahas lebih jauh tentang pembaruan pendidikan pesantren, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian pembaruan secara etimologis. Pembaruan berasal dari kata baru (baharu) mendapat awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” yang berarti proses, perbuatan, cara membarui; proses pengembangan adat istiadat, metode produksi atau cara hidup yang baru.¹⁰⁸ Secara terminologis, pembaruan berarti suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya) serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu. Bila disimpulkan secara singkat, maka pembaruan berarti sesuatu yang dilakukan secara efektif, efisien dan produktif menuju kepada kemajuan.¹⁰⁹

¹⁰⁷*Ibid.*, h. 89.

¹⁰⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, 82.

¹⁰⁹Lihat H. Bahaking Rama, *op. cit.*, h. 22.

Pembaruan pendidikan pesantren yang akan dikemukakan dalam pembahasan ini meliputi pembaruan pada beberapa aspek:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembaruan terhadap sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam mengembangkan kemajuan sebuah lembaga pesantren. K.H. Sahal Mahfudz sebagaimana dikutip oleh H. M. Sulthon Masyhud, mengatakan bahwa jika pesantren ingin berhasil dalam melakukan pengembangan masyarakat yang salah satu dimensinya adalah pengembangan semua sumber daya, maka pesantren harus melengkapi dirinya dengan tenaga yang terampil (*professional*) mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya, disamping syarat lain yang diperlukan untuk berhasilnya pengembangan masyarakat.¹¹⁰

2) Aspek Metode Pembelajaran

Model pembelajaran pesantren pada mulanya populer menggunakan metode-didaktif dalam bentuk *sorogan*, *bandongan*, *halaqah* dan hafalan. *Sorogan* artinya belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi pembelajaran dan saling mengenal diantara keduanya. *Bandongan* artinya belajar secara kelompok yang diikuti seluruh santri. Biasanya kiai menggunakan bahasa daerah dan langsung menerjemahkan kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya. Sedangkan *halaqah*, yaitu diskusi untuk memahami isi kitab, bukan dalam konteks benar dan salah, tetapi lebih pada upaya pemahaman terhadap kandungan kitab.¹¹¹

3) Aspek Kurikulum

Secara yuridis, pengertian kurikulum dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 bab X tentang kurikulum sebagai berikut: “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal”.¹¹² Selain itu, model pengertian kurikulum yang luas, juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya bagian kedua, pasal 16 ayat 1 sebagai berikut:

“Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok

¹¹⁰H.M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *op. cit.*, h. 19.

¹¹¹Lihat H. Amiruddin Nahrawi, *op. cit.*, h. 28.

¹¹²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya (Yogyakarta: Media Wacana, 2003), h. 27.

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.”¹¹³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di atas, dapat dipandang bahwa tugas sekolah atau lembaga pendidikan adalah membantu orang tua dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bersifat menyeluruh: intelektual, perasaan dan keterampilan sekaligus. Dengan kata lain, sekolah dewasa ini bertugas untuk menjalankan pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan kedisiplinan dan pendidikan keterampilan.

4) Aspek Evaluasi

Kemampuan santri biasanya dievaluasi dengan keberhasilannya mengajarkan kitab kepada orang lain. Jika santri yang dia ajar merasa puas dan memahami apa yang diajarkannya, maka santri tersebut dinilai telah lulus. Legalisasi kelulusan adalah restu kiai bahwa santri tersebut diizinkan pindah mempelajari kitab lain yang lebih tinggi tingkatannya dan boleh mengajarkan kitab yang dikuasainya kepada orang lain.

C. MENGENAL SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN SULAWESI UTARA

1. *Sistem Pendidikan Pesantren*

Pembahasan tentang sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara ini akan mengetengahkan 4 buah pesantren yang menjadi objek penelitian, yakni Pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan (LPI-PKP) Manado, Pesantren Alkhairaat Bintauna Bolaang Mongondow Utara, Pesantren Hidayatullah Bitung, dan Pesantren Assalam Manado. Lebih jelasnya dibahas dalam rincian sebagai berikut:

a. **Pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan (LPI-PKP) Manado**

1) Sekilas Tentang Pesantren LPI-PKP Manado

Pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan (LPI-PKP) Manado, merupakan salah satu karya monumental Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional ke X tahun 1977. Keberadaan pesantren dicanangkan sebagai wadah kaderisasi generasi muda Islam di daerah Sulawesi Utara. Tujuannya agar lulusan pesantren dapat menjadi kader pembangunan bangsa yang bertakwa, cakap, dinamis dan terampil sesuai cita-cita pembangunan nasional.¹¹⁴

¹¹³Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6.

Penamaan pesantren ini dengan didahului nama/istilah Lembaga Pendidikan Islam (LPI), tidak langsung menyebut Pesantren Pondok Karya Pembangunan atau Pondok Pesantren Karya Pembangunan, disebabkan secara teologis, masyarakat Sulawesi Utara mayoritas beragama non-Muslim, sehingga penggunaan label Islam pada nama sebuah pesantren harus ada, untuk membedakan lembaga-lembaga lainnya yang banyak dikembangkan oleh kaum nasrani di Sulawesi Utara.

2) Struktur Organisasi Pesantren

Struktur organisasi Pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan pertama kali ada melalui Surat Keputusan yayasan yang dibentuk berdasarkan Akte Pendirian Notaris R. H. Hardasaputra, S.H., Nomor 06 tanggal 03 Oktober 1984. Yayasan ini diberi nama Yayasan Karya Islamiyah (YKI) Pusat Manado, yang didirikan oleh beberapa pemuka Islam di Sulawesi Utara ketika itu, yakni: 1) Tuan Haji Kamis Mochammad Yoesoef Oentowirjo (Ketua Yayasan yang pertama); 2) Drs. H. Abdullah Mokoginta; 3) Kolonel Purnawirawan Rauf Mo'o; 4) Drs. H. Djainuddin Ahmad; 5) Drs. Ahmad Arbie; 6) Abdul A. J. Paransa, S.H; 7) Abdul Karim Badjeber, S.H; 8) Drs. Sukardi Sugeha.¹¹⁵

Guna meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan pada pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan Manado, maka pada tahun 1981 dibentuk struktur organisasi pesantren LPI-PKP yang didasarkan pada Surat Keputusan Yayasan Karya Islamiyah Pusat Manado Nomor: 03 tahun 1984, dengan susunan personalia sebagai berikut: K. H. Rizali M. Noor sebagai Pengasuh/Pimpinan Pesantren, Syamsuddin Rauf sebagai Sekretaris dan Tamruddin sebagai Pembina Santri.

3) Sistem Madrasah

Madrasah yang ada di Pesantren LPI-PKP Manado terdiri dari dua tingkatan, yakni Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. 1) Madrasah Tsanawiyah PKP Manado, dipimpin oleh Hj. Nurul Asniah, S.Ag. Menurut Muh. Nuril Huda, wakil kepala bagian kurikulum Madrasah Tsanawiyah PKP Manado bahwa madrasah ini memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut: Madrasah Tsanawiyah PKP memiliki pegawai berjumlah 15 orang, yang terdiri dari kepala madrasah 1 orang, wakil kepala madrasah 2 orang, Guru tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 5 orang, guru tidak tetap 4 orang, pegawai tata usaha tidak tetap

¹¹⁴Profil Pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan Manado (Manado: Disimpan oleh Munir D. Mangawi, 2011).

¹¹⁵ *Ibid.*

2 orang dan pesuruh/penjaga 1 orang.¹¹⁶ 2) Madrasah Aliyah PKP Manado. Wakil Kepala Bagian Kurikulum Madrasah Aliyah PKP Manado menjelaskan sebagai berikut: Pegawai pada Madrasah Aliyah PKP Manado berjumlah 26 orang, dengan rincian sebagai berikut: kepala madrasah 1 orang, wakil kepala madrasah 4 orang, guru tetap PNS berjumlah 8 orang, guru tidak tetap 10 orang, pegawai tata usaha tidak tetap 2 orang dan pesuruh/penjaga 1 orang.¹¹⁷

4) Sistem Pendidikan dan Pembelajaran

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan Manado, menyelenggarakan pendidikan formal dan kegiatan nonformal berupa kegiatan kepesantrenan. Proses Pendidikan formal yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah PKP Manado, mengacu pada kurikulum Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Sedangkan untuk kegiatan kepesantrenan, mengacu pada kurikulum yang disusun oleh pengasuh pesantren, yang berorientasi pada kajian kitab-kitab kuning/klasik.

Kegiatan kepesantrenan seperti dijelaskan oleh Munir Dg. Mangawi, terdiri dari program pembelajaran yang disusun oleh pihak pesantren serta program pengembangan dan penyaluran bakat santri. Lebih lanjut dapat dikutip penjelasannya sebagai berikut:

Program kepesantrenan dilakukan di luar jam pelajaran yang ada di madrasah, dengan materi antara lain: pengajian kitab, aplikasi bahasa Arab, bahasa Inggris, pidato/dakwah, aplikasi al-Quran, keterampilan keagamaan dan umum. Beberapa kitab yang diajarkan antara lain: kitab *Jalālain*, *Taqr³b*, *Fath³ āl-Qar³b*, *Ta'lim Nāsyi'³n* dan *Bulūghul Marām*. Adapun Program pengembangan dan penyaluran bakat santri dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti latihan bermain rebana, qasidah, kesenian lainnya dan olahraga beladiri.¹¹⁸

b. Pesantren Alkhairaat Bintauna Bolaang Mongondow Utara

1) Sekilas Tentang Pesantren Alkhairaat Bintauna

Pendirian pesantren Alkhairaat Bintauna bermula dari kebutuhan akan sebuah pengetahuan ilmu-ilmu keagamaan (Islam) sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Hal tersebut dipandang sangat penting agar setiap umat mampu mengendalikan diri terutama dalam menghadapi berbagai gejolak dan perubahan kehidupan baik secara

¹¹⁶Muh. Nuril Huda (38 tahun), Wakil Kepala Bagian Kurikulum Madrasah Tsanawiyah PKP Manado, *Wawancara*, Manado, 7 Pebruari 2011.

¹¹⁷Suharto Demanto (40 tahun), Wakil Kepala Bagian Kurikulum Madrasah Aliyah PKP Manado, *Wawancara*, Manado, 7 Pebruari 2011.

¹¹⁸Munir D. Mangawi (37 tahun), Guru Madrasah Aliyah/Sekretaris Yayasan Karya Islamiyah Manado Sulawesi Utara, *Wawancara*, Manado, 7 Pebruari 2011.

langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap persoalan moral, etika dan akhlak.¹¹⁹

Sejarah terbentuknya lembaga pendidikan Pesantren Alkhairaat Bintauna, berawal dari sebuah kisah perjalanan pendiri Alkhairaat pusat Palu, K. H. Sayyid Idrus Bin Salim al-Djufri, seperti dijelaskan oleh Abdurrahman Bata, Ketua Pengurus Pesantren Alkhairaat Bintauna sebagai berikut:

Pesantren Alkhairaat Bintauna berawal dari sebuah perjalanan pendiri perguruan Islam Alkhairaat, K. H. Sayyid Idrus Bin Salim Al-Djufri (biasa disebut Guru Tua) dari Gorontalo menuju Manado pada sekitar tahun 1942. Dalam perjalanan dengan menggunakan kapal laut tersebut, beliau istirahat dan menginap beberapa malam pada keluarga al-Jeredi di desa Talaga kecamatan Bintauna. Beliau sempat berdoa agar kelak di daerah tersebut akan berdiri sebuah lembaga pendidikan Alkhairaat.¹²⁰

Lebih lanjut Abdurrahman Bata menjelaskan bahwa:

K. H. Sayyid Idrus bin Salim al-Djufri kemudian meminta kepada keluarga al-Jeredi agar beliau dipertemukan dengan Raja Bintauna yang ketika itu adalah Raja Mohammad Datunsolang. Guru Tua menyampaikan keinginannya agar Alkhairaat dapat didirikan di Bintauna. Keinginan Guru Tua tersebut disambut oleh Raja Mohammad, namun belum dapat direalisasikan saat itu, mengingat adanya kekhawatiran dari penjajah Jepang yang tidak menginginkan didirikan perguruan Islam Alkhairaat di Bintauna.¹²¹

Penjelasan tentang sejarah tersebut dilanjutkan oleh seorang murid Alkhairaat asal Sulawesi Tengah yang sekarang sebagai Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah Alkhairaat Bintauna, *ustāz* Hasan Filabuya sebagai berikut:

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka penjajah Jepang meninggalkan Indonesia dan warga mulai merasakan adanya sebuah kebutuhan untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam di Bintauna. Pada tahun 1963, beberapa pemuda di Bintauna berinisiatif untuk merespon keinginan Guru Tua untuk mendirikan lembaga pendidikan Alkhairaat di Bintauna. Para pemuda tersebut adalah Salengke Datunsolang, Hamidu Datunsolang dan Bahid Paloa.¹²² Atas inisiatif dari ketiga pemuda tersebut, maka pada tanggal 5 September 1963, berdirilah sebuah lembaga pendidikan Alkhairaat

¹¹⁹ Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Direktori Pesantren*, Jilid 2 (Jakarta: t.p., 2007), h. 55.

¹²⁰ Abdurrahman Bata (41 tahun), Ketua Pengurus Pesantren Alkhairaat Bintauna, *Wawancara*, Bintauna, 10 Januari 2011.

¹²¹ Abdurrahman Bata (41 tahun), Ketua Pengurus Pesantren Alkhairaat Bintauna, *Wawancara*, Bintauna, 10 Januari 2011.

¹²² Abdurrahman Bata (41 tahun), Ketua Pengurus Pesantren Alkhairaat Bintauna, *Wawancara*, Bintauna, 10 Januari 2011.

bernama Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Bintauna, dengan tenaga pengajar yang datang dari Manado yaitu *ustāz* Said Basyir dan *ustāz* Hasan Baziad.¹²³

Kedaaan madrasah yang ada di Bintauna terus berkembang dan masyarakat semakin antusias menerima kehadiran madrasah yang dibangun oleh pengurus Alkhairaat tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Hasan Filabuya:

Kehadiran Madrasah Ibtidaiyah dan Mualli¹²⁴ Alkhairaat membuat masyarakat Bintauna merasa memiliki dan ingin turut serta mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. Pada tanggal 1 September 1975, dibukalah Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat. Madrasah ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, namun pengurus Alkhairaat merasakan adanya kekurangan, karena alumni madrasah Tsanawiyah belum memiliki sekolah lanjutan pada lembaga tersebut. Pada tanggal 10 Desember 1991, dibukalah lanjutan sekolah tersebut dengan nama Madrasah Aliyah Alkhairaat Bintauna, dengan kepala Madrasah *ustāz* Abdul Muthalib Ruana.¹²⁵

Pembukaan Madrasah Aliyah tersebut, membuat perkembangan pendidikan Islam Alkhairaat semakin dikenal di tengah masyarakat sekitar. Berbagai upaya dilakukan oleh *ustāz* Abdul Muthalib Ruana dengan beberapa guru lainnya, dibantu dengan pengurus Alkhairaat untuk mengembangkan madrasah yang ada.

2) Struktur Organisasi Pesantren

Sebagaimana layaknya bahwa setiap institusi atau lembaga, agar mudah dalam menjalankan dan/atau melaksanakan tugas-tugas dan tujuannya, tentunya harus ada struktur-struktur organisasi kepengurusan. Maka pada tahun 1999 dibentuk sebuah struktur kepengurusan dengan nama Yayasan Pendidikan Alkhairaat dengan Akta Notaris N0: 2 Tahun 1999, Tanggal 1 Maret 1999, kemudian dari pengurus yayasan pendidikan dibentuk lagi sub kepengurusan pesantren untuk lebih menjangkau pelayanan dan mengefektifkan kinerja yang optimal.¹²⁶

3) Sistem Madrasah/Sekolah

¹²³Hasan Filabuya (49 tahun), Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah Alkhairaat Bintauna, *Wawancara*, Bintauna, 10 Januari 2011.

¹²⁴Penamaan Muallimin sebagai salah satu unit lembaga pendidikan diniyah dasar di Alkhairaat, diberikan oleh Yayasan Pendidikan Alkhairaat. Hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 16 ayat (3) sebagai berikut: Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 435.

¹²⁵Hasan Filabuya (49 tahun), Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah Alkhairaat Bintauna, *Wawancara*, Bintauna, 10 Januari 2011.

¹²⁶Direktori Pesantren, jilid 2, *loc. cit.*

Madrasah/Sekolah yang ada di pesantren Alkhairaat Bintauna terdiri dari 6 buah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alkhairaat; 2) Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Alkhairaat; 3) Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) Alkhairaat; 4) Sekolah Dasar (SD) Alkhairaat; 5) Madrasah Tsanawiyah Alkhairaat; 6) Madrasah Aliyah Alkhairaat.

4) Sistem Pendidikan dan Pembelajaran

Pesantren Alkhairaat Bintauna awalnya hanya menyelenggarakan tingkat Madrasah Diniyah (MADIN) saja. Hal ini dijelaskan oleh H. T. Misaalah, pimpinan Pesantren Alkhairaat Bintauna sebagai berikut:

Sistem pendidikan yang dilaksanakan di MADIN Pesantren Alkhairaat Bintauna ini, sebagaimana pesantren lain yang tersebar di Indonesia pada umumnya, menggunakan sistem klasikal dan sederhana dimana pendidikan agama yang menjadi prioritas utama, namun begitu juga diberikan materi umum dengan perbandingan 75% agama dan 25% adalah umum.¹²⁷

Kemudian dengan pertimbangan kuantitas dan kualitas para santri, Yayasan Pondok Pesantren memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan formal, yaitu Madrasah Tsanawiyah. Hal ini didorong oleh adanya keinginan sebagian wali murid yang mempunyai keinginan agar apa yang sudah diperoleh di tingkat dasar, bisa dilanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

c. Pesantren Hidayatullah Bitung

1). Sekilas tentang Pesantren Hidayatullah Bitung

Sekitar tahun 1994, Pesantren Hidayatullah Kinilow Tomohon yang diasuh oleh *ustāz* Abdul Qadir memberi tugas 2 orang santrinya yaitu Said dan Abdullah untuk menjajaki kemungkinan pendirian pesantren di Bitung. Sudah menjadi kebiasaan pada beberapa pesantren di Indonesia, ketika melihat perkembangan agama Islam di suatu tempat berkembang pesat dan maju, maka keinginan untuk “melebarkan sayap” menjadi suatu hal yang bisa dimaklumi.¹²⁸

Setelah melalui upaya pengenalan dan pemahaman terhadap karakter dan kebiasaan penduduk lokal, dengan hati-hati mereka mengungkapkan rencana untuk mendirikan pesantren di daerah itu. Secara umum bisa dikatakan bahwa masyarakat sekitar menyambut baik ide tersebut. Bahkan sambutan yang sungguh luar biasa datang

¹²⁷H. Harsono T. Misaalah (48 tahun), Pimpinan Pesantren Alkhairaat Bintauna, *Wawancara*, Bintauna, 18 Januari 2011.

¹²⁸ Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 58.

dari salah seorang hamba Allah yang sangat dermawan, Muhammad Agil, yang mewakafkan tanahnya sebagai tempat untuk pendirian pesantren.¹²⁹

Tanah yang diwakafkan tersebut, dibangun di atasnya sebuah masjid oleh kedua santri ini dengan bantuan masyarakat sekitar baik berupa material maupun tenaga. Setelah selama 1 tahun pengembaraan kedua santri ini tepatnya tahun 1995, di tempat ini kemudian berdiri Pesantren Hidayatullah Bitung yang berinduk ke Pesantren Hidayatullah Pusat di Balikpapan.

2). Struktur Organisasi Pesantren

Adapun bentuk struktur organisasi yang diterapkan di Pesantren Hidayatullah Bitung, mengikuti petunjuk dari Pesantren Hidayatullah pusat di Balikpapan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Alie Muddin sebagai berikut:

Bentuk organisasi yang diterapkan sesuai petunjuk dari Pesantren Hidayatullah pusat, yaitu seorang pemimpin dibantu sekretaris, bendahara serta seksi-seksi sesuai kebutuhan. Dalam hal pengambilan keputusan penting, kadang masih melibatkan pesantren pusat. Hal tersebut bukan karena pesantren Hidayatullah Bitung tidak mempunyai independensi akan tetapi semata-mata sebagai ungkapan *ta'dzim* (rasa hormat) pesantren “cabang” terhadap gurunya di pusat.¹³⁰

3). Sistem Madrasah

Madrasah yang ada di pesantren Hidayatullah terdiri dari tiga tingkatan, yakni Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.

d. Pesantren Assalam Manado

1). Sekilas tentang Pesantren Assalam Manado

Pesantren Assalam didirikan oleh Yayasan Karya Islamiyah tahun 1989. Sebelum mendirikan pesantren, yayasan sudah memiliki sejumlah kegiatan, antara lain: mendirikan masjid Assalam pada tahun 1987 di kompleks perumahan pajak jalan 17 Agustus Wale Temboan Manado. Selain itu, yayasan juga memiliki majelis taklim, Studi Islam Assalam (SIAM) dan poliklinik Assalam.¹³¹

Setelah berhasil membangun masjid, yayasan kemudian mendirikan panti asuhan untuk menampung anak yatim piatu dan anak dari orang tua yang tidak mampu.

¹²⁹Direktorat Pendidikan, *Ibid*.

¹³⁰Alie Muddin (38 tahun), Pimpinan Pesantren Hidayatullah Bitung, *Wawancara*, Bitung, 25 Januari 2011.

¹³¹Profil Pesantren Assalaam Manado (Manado: Disimpan oleh Harsono Makalalag, 2011).

Setelah itu mereka membangun gedung sekolah yang diproyeksikan untuk menampung anak-anak yatim piatu tersebut. Pada perkembangan berikutnya, gedung sekolah itu menjadi cikal bakal pesantren puteri Assalam. Pembangunan sarana pendidikan itu diketuai oleh Drs. Soemijanto yang ketika itu menjabat selaku kepala Inspeksi Pajak Manado.¹³²

2). Struktur Organisasi Pesantren

Penjelasan tentang struktur organisasi Pesantren Assalam Manado mulai dari pimpinan pesantren hingga bidang-bidang lainnya, dijelaskan oleh H. Ahmad Djunaedi, pimpinan Pesantren Assalam Manado sebagai berikut:

Mekanisme kerja Pesantren Assalam diatur sepenuhnya oleh Yayasan Assalam. Struktur pesantren Assalam dipimpin oleh seorang pengasuh/pimpinan pesantren. Pengasuh dibantu oleh seorang sekretaris dan bendahara, dan struktur dibawahnya adalah kepala-kepala Sekolah/Madrasah. Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan pesantren dibantu juga oleh 6 orang kepala bidang yang menangani bidangnya masing-masing. Bidang-bidang tersebut adalah, bidang kurikulum, bidang sarana, bidang asrama, bidang laboratorium, bidang kesarifan dan bidang dakwah dan ubudiyah.¹³³

Lebih lanjut tentang tugas bidang-bidang tersebut, dijelaskan oleh Harsono Makalalag, sekretaris Pesantren Assalam Manado sebagai berikut:

Bidang kurikulum menangani urusan yang berhubungan dengan pemerintahan, pesantren, perpustakaan dan *murājaah durūs*. Bidang sarana mengurus bidang berling, teknisi dan keamanan. Bidang asrama mengurus asrama, yang terdiri dari asrama puteri dan asrama putera, termasuk mengurus konsumsi santri tersebut. Bidang laboratorium mengurus laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan laboratorium IPA. Bidang kesarifan mengurus Organisasi Pelajar Pesantren Assalam (OPPA), mengurus kegiatan ekstrakurikuler, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan kegiatan santri lainnya.¹³⁴

3). Sistem Madrasah

Madrasah/Sekolah yang ada di pesantren Assalam terdiri dari Madrasah Tsanawiyah Assalam, Madrasah Aliyah Assalam dan Sekolah Menengah Kejuruan Assalam.

¹³²Profil Pesantren Assalam Manado (Manado: Disimpan oleh Harsono Makalalag, 2011).

¹³³H. Ahmad Djunaedi (38 tahun), Pimpinan Pesantren Assalam Manado, *Wawancara*, Manado, 27 Januari 2011.

¹³⁴Harsono Makalalag (48 tahun), Sekretaris Pesantren Assalam Manado, *Wawancara*, Manado, 27 Januari 2011.

4). Sistem Pendidikan dan Pembelajaran

Pesantren Assalam Manado yang memiliki 3 buah lembaga pendidikan formal, menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum dari Kementerian Agama untuk Madrasah dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk Sekolah Umum. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren Assalam Manado, selain menggunakan kedua bentuk kurikulum tersebut, diberlakukan juga kurikulum kepesantrenan dan kegiatan ekstra kurikuler.

Penjelasan tentang sistem pendidikan dan pembelajaran pada Pesantren Assalam Manado, tergambar dari penjelasan tentang kurikulum yang digunakan sebagaimana penjelasan dari Mulyadi, sekretaris Pesantren Assalam Manado sebagai berikut:

Secara umum, kurikulum dari pemerintah (kecuali untuk Sekolah Menengah Kejuruan), meliputi: Pendidikan Agama Islam (*Aq³dah Akhlāq, Fiqih, Qur'ān Had³£* dan Sejarah Kebudayaan Islam), PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Matematika. Sedangkan kurikulum pesantren meliputi *al-qurān* dan *tajw³d*, *tafs³r*-ilmu *tafs³r*, *had³£* dan ilmu *had³£*, *mu⁻āla'ah*, *tau⁺d*, *fiqih* dan *ujhul fiqh*, *akhlāq*, *sirah* dan sejarah Islam/*£aqāfah* (peradaban Islam).¹³⁵

Lebih lanjut gambaran tentang sistem pendidikan yang diterapkan di Pesantren Assalam Manado dijelaskan kembali oleh Mulyadi sebagai berikut:

Kegiatan ekstra kurikuler meliputi; pendidikan jasmani dan kesehatan, olahraga, komputer, tata boga, menjahit, pramuka, kesenian (kasidah dan drumb band) dan *mutāharah* (latihan pidato tiga bahasa; Arab-Indonesia-Inggris). Semua kegiatan santri tersebut telah disusun berdasarkan jadwal kegiatan santri setiap hari. Kegiatan yang dilakukan santri pesantren Assalam dimulai pukul 04.00 pagi dan berakhir ketika para santri akan istirahat malam pukul 22.00.¹³⁶

2. *Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Pendidikan Pesantren di Sulawesi Utara*

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuatan yang dimiliki pesantren ataupun kekuatan pesantren untuk mempertahankan eksistensinya serta mengembangkan sistem pendidikan yang ada. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat diklarifikasi sebagai berikut:

¹³⁵Mulyadi (38 tahun), Sekretaris Pesantren Assalaam, *Wawancara*, Manado, 20 Oktober 2010.

¹³⁶Mulyadi (38 tahun), Sekretaris Pesantren Assalaam, *Wawancara*, Manado, 20 Oktober 2010.

1) Peran serta masyarakat Muslim di Sulawesi Utara

Masyarakat muslim di Sulawesi Utara, merupakan kekuatan utama dalam pengembangan pesantren yang ada di Sulawesi Utara. Input semua pesantren dalam berbagai hal tergantung pada partisipasi aktif masyarakat muslim yang ada. Input yang dimaksud oleh peneliti adalah input berupa partisipasi memasukkan calon santri ke pesantren-pesantren di Sulawesi Utara, memberikan dukungan finansial dalam bentuk donatur tetap ataupun tidak tetap, dan memberikan masukan-masukan moril untuk peningkatan pengelolaan pesantren.

2) Dukungan Pemerintah Setempat

Pada awal perkembangannya, pesantren di Sulawesi Utara hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dengan sedikit bantuan dari masyarakat setempat, untuk dapat menjalankan aktivitas proses belajar mengajar di pesantren. Dengan semakin berkembangnya waktu, lembaga pendidikan pesantren khususnya yang menyelenggarakan pendidikan formal, mulai dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat (Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional).

Dukungan pemerintah tersebut dapat dilihat dengan dialokasikannya bantuan operasional dan gedung untuk pengembangan sekolah, madrasah dan pesantren pada setiap tahunnya. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah, bahkan beberapa Kementerian lainnya seperti Kementerian Koperasi, Pertanian, telah membuat program khusus yang membantu pelaksanaan sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara.

3) Dukungan Alumni

Alumni setiap pesantren merupakan kekuatan yang terlupakan oleh pihak pesantren. Peneliti menyebutkan 'kekuatan yang terlupakan', karena dalam penelusuran terhadap alumni tersebut di empat pesantren yang menjadi objek penelitian, tidak satupun pesantren yang menaruh perhatian serius terhadap alumninya untuk dijadikan sebagai salah satu kekuatan yang mendukung proses pembelajarannya, bahkan tidak satupun pesantren yang memiliki data pendukung tentang keberadaan alumninya, termasuk pekerjaan dan profesi yang sedang digeluti oleh para alumni tersebut.

Peneliti menemukan data alumni tersebut, langsung dari alumni bersangkutan dan dari alumni yang sudah ditemui kemudian dilakukan penelusuran kembali sehingga peneliti menemukan sebagian data yang dibutuhkan.

b. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara, peneliti ungkapkan dengan memperhatikan hal-hal yang harus dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab II tentang lingkup, fungsi dan tujuan, pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan h. standar penilaian pendidikan.¹³⁷

Idealnya peneliti mengangkat lingkup pesantren sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Namun karena keterbatasan peneliti, lingkup yang diangkat hanya berkisar pada 5 aspek saja, yakni:

1) Kelembagaan dan keorganisasian Pesantren

Secara umum semua pesantren di Sulawesi Utara telah dilengkapi dengan unsur kelembagaan dan keorganisasian yang memadai. Aspek kelembagaan dan keorganisasian yang menyertai kehadiran pesantren di Sulawesi Utara, merupakan unsur penting yang menjamin kelangsungan proses pembelajaran di pesantren. Aspek kelembagaan yang dimaksud adalah adanya yayasan pesantren yang dibentuk untuk mengurus kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pesantren, sementara aspek keorganisasian adalah personil yang menduduki tugas tertentu dalam sebuah lembaga.

2) Kepemimpinan Pesantren

Kepemimpinan pesantren di Sulawesi Utara didominasi dengan tipe kepemimpinan *Laissez Faire*, yaitu para pimpinan pesantren lebih banyak mendelegasikan tugasnya kepada pengasuh lainnya di pesantren, bahkan pimpinan pesantren di Sulawesi Utara lebih banyak yang menginap di luar pesantren dari pada yang tinggal dalam pesantren.

3) Kurikulum Pesantren

Kurikulum merupakan salah satu unsur sistem pendidikan pesantren utama yang harus mendapatkan perhatian dari pihak pengelola pesantren. Jika kurikulum tidak disusun dengan baik, maka pesantren akan kehilangan identitasnya sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam. Citra lembaga pendidikan pesantren sangat ditentukan oleh kualitas kurikulumnya dan juga penerapannya.

¹³⁷Tim Redaksi Fokusmedia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 5-6.

4) Pendidik/*Ustāz*

Selanjutnya faktor penghambat yang ditimbulkan melalau sistem pendidikan dan pembelajaran di pesantren, dapat dilihat pula dari segi latar belakang pendidikan para pendidik di pesantren.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren yang banyak menggunakan tenaga pendidiknya dengan latar belakang pendidik SMU atau yang setingkat dengannya adalah pesantren Hidayatullah Bitung, yang memiliki 12 orang tenaga pendidik atau 66,66%, disusul oleh pesantren Alkhairaat Bintauna dengan 16 orang tenaga pendidik atau 29,09%, posisi selanjutnya pesantren Assalam Manado dengan 12 orang pendidik atau 23,07%, dan pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan hanya menggunakan 1 orang tenaga pendidik SMU atau 4,34%. Kualitas proses belajar mengajar, akan sangat dipengaruhi oleh kualitas para pendidik. Semakin tinggi kualitas pendidik, maka akan semakin meningkat kualitas pembelajaran di pesantren.

5) Peserta Didik/Santri

Permasalahan atau faktor penghambat lainnya dalam sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara, dapat di lihat dari jumlah santri yang mukim dengan jumlah santri yang tidak mukim. Data penelitian menunjukkan bahwa hanya 1 pesantren saja yang memiliki santri mukim 100%. Pesantren lainnya, menerapkan sistem mukim dan kalong. Pesantren yang paling banyak memiliki santri yang tinggal di luar pesantren adalah pesantren Hidayatullah Bitung, yakni 368 santri atau 91,31% yang tinggal di luar, sedangkan sisanya tinggal di dalam pesantren yakni 35 orang atau 8,68%.

Pesantren Alkhairaat Bintauna menampung 83 orang santri (17,77%) yang mukim di pesantren, sedangkan 384 santri atau 82,22% tinggal di luar pesantren. Adapun pesantren Assalam yang memiliki 3 lembaga pendidikan formal, yakni Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan, lebih banyak menampung santri mukim dari pada santri kalong. Tabel di atas menunjukkan 241 orang santri atau 90,60% mukim di pesantren dan sisanya 25 orang (9,39%) tinggal di luar pesantren.

3. *Analisis dan Solusi Alternatif Faktor Penghambat Sistem Pendidikan Pesantren di Sulawesi Utara*

a. Analisis dan Solusi Kelembagaan dan Keorganisasian Pesantren

Hasil temuan menyangkut sistem pendidikan pesantren pada aspek kelembagaan dan keorganisasian, telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya yang menyebutkan bahwa peran kiai dalam pesantren merupakan figur sentral, otoritatif dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Hal ini dikemukakan oleh H. M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo. Pendapat yang kontradiktif, dikemukakan oleh peneliti sesudahnya yang menyebutkan peran kiai tidak lagi merupakan figur sentral dan penentu seluruh kebijakan di pesantren. Pendapat ini dikemukakan oleh Muljono Damopolii yang menyebutkan bahwa Pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan Manado merupakan pesantren yang berbasis sistem.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, posisi peneliti dalam penelitian ini mendukung dan lebih mempertegas hasil penelitian yang dilakukan oleh Muljono Damopolii, karena fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pesantren di Sulawesi Utara menerapkan kepemimpinan yang berbasis sistem, yakni kepemimpinan kolektif yang tidak didominasi oleh pimpinan pesantren saja atau kiai. Menyangkut tipologi kepemimpinan pesantren di Sulawesi Utara, peneliti mendukung pandangan Sondang P. Siagian, yang menyebutkan salah satu tipologi kepemimpinan dengan istilah *laissez faire*, yakni pimpinan lebih banyak mendele-gasikan tugas kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas. Fenomena tersebut merupakan fakta yang peneliti temukan pada pesantren di Sulawesi Utara.

Solusi yang dapat peneliti kemukakan untuk mengantisipasi permasalahan status lembaga pendidikan pesantren di Sulawesi Utara adalah:

- 1) Status lembaga pesantren tidak perlu diubah dalam hal kepemilikannya, tetap berada di bawah yayasan masing-masing;
- 2) Pembagian *job description* antara pengurus yayasan dan pengurus pesantren sangat mendesak untuk segera dilakukan. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, adalah bahwa masing-masing pengurus baik yayasan maupun pesantren, belum memiliki pembagian tugas yang jelas, sehingga dalam mengurus sesuatu urusan kadang terjadi benturan.
- 3) Pengurus yayasan yang ditunjuk diupayakan berasal dari kalangan pemerhati pendidikan yang memiliki waktu luang untuk berpikir dan mengurus yayasan yang dipimpinnya. Lebih diutamakan lagi adalah pengurus yang memiliki hubungan emosional yang erat dengan pesantren, seperti yang dilakukan oleh pesantren LPI-PKP Manado yang menunjuk ketua Yayasan Karya Islamiyah dari kalangan pesantren atau pendiri pesantren LPI-PKP Manado, yakni K.H. Drs. Rizali M. Noor. Demikian pula dengan Pesantren Hidayatullah Bitung, yang mengangkat

ketua Yayasan/Pengurus Wilayahnya berasal dari kalangan pesantren Hidayatullah, yakni Ali Murtadho yang memiliki kepedulian yang tinggi untuk mengembangkan yayasan dan pesantren.

b. Analisis dan Solusi Kepemimpinan Pesantren

Kepemimpinan pesantren di Sulawesi Utara telah peneliti gambarkan sebelumnya dengan menyebut tipologi kepemimpinannya dengan istilah *laisser faire* (Gaya seorang manajer yang santai dalam memimpin organisasi. Pengambilan keputusan dalam gaya ini biasanya mendelegasikan segala urusannya kepada bawahan dengan pengarahan minimal atau bahkan tanpa arahan sama sekali, dan bukan saja dalam persoalan yang bersifat rutin, melainkan juga termasuk dalam pemecahan masalah yang fundamental. Peneliti menyebut dengan istilah tersebut karena berdasarkan temuan di lapangan terbukti beberapa hal menyangkut kepemimpinan pesantren sebagai berikut: *pertama*, pimpinan pesantren yang ditunjuk, sebagian besar tinggal di luar pesantren, hanya ada satu pimpinan pesantren yang tinggal di dalam pesantren, yakni pimpinan Pesantren Hidayatullah Bitung. Dengan tinggal di luar pesantren, pimpinan pesantren menyerahkan segala urusan pembinaan terhadap santri kepada pengasuh lainnya yang tinggal di pesantren.

Kedua, perodesasi kepemimpinan pesantren tidak memiliki pola dan aturan baku yang mengaturnya, sebab pergantian pimpinan pesantren ditentukan dengan adanya kader yang siap memimpin, sementara sistem kaderisasi kepemimpinan belum mendapat perhatian serius dari pihak pesantren untuk menyiapkannya.

Ketiga, belum ada satupun dari pimpinan pesantren tersebut yang mendapat gelar kiai. Kendatipun demikian, menurut peneliti, untuk mendapatkan gelar tersebut bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pimpinan pesantren, dan upaya tersebut salah satunya adalah dengan menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pimpinan pesantren yang memiliki kemampuan dalam mengelola pesantrennya, dan sekaligus memiliki kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungannya. Hal ini belum terlihat dan tergambar dari keempat pesantren yang diteliti, dan merupakan salah satu faktor penghambat kemajuan sebuah pesantren.

Berdasarkan beberapa analisis yang telah dikemukakan tersebut, maka solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Pesantren harus menyiapkan lembaga pengkaderan calon pemimpin dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk menggodok dan melatih para kader pemimpin.

- 2) Pesantren harus menyiapkan kader-kadernya yang berkualitas untuk dibimbing dan dilatih melalui lembaga pengkaderan yang diatur oleh pesantren tersebut.
- 3) Pesantren harus menyiapkan para kiai/ulama, guru professional dan pelatih lainnya, untuk membimbing dan menyiapkan kader-kader calon pemimpin pada lembaga yang sudah disiapkan.
- 4) Meningkatkan kualitas calon pemimpin pada sisi pendidikan formal dengan melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

c. Analisis dan Solusi Kurikulum Pesantren

Menyangkut aspek kurikulum, teori James A. Beane yang menyebutkan kategori kurikulum sebagai program, dipahami sebagai program pendidikan yang disediakan oleh sekolah untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Kenyataan di lapangan yang peneliti temukan menunjukkan bahwa kurikulum pesantren di Sulawesi Utara lebih banyak menerapkan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Peneliti lebih mendukung teori James, bahwa pesantren semestinya harus menyediakan kurikulum kepesantrenannya daripada hanya menerima kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

Kurikulum pada pesantren di Sulawesi Utara memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Proses pembelajarannya dilakukan di kelas untuk jenjang pendidikan formal dan dilakukan di luar kelas/jam pelajaran sekolah untuk kurikulum kepesantrenan yang dibuat sendiri oleh pesantren. Kurikulum yang disusun oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional sudah jelas keberadaannya dan tujuan yang hendak dicapai. Hal menarik untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah kurikulum yang disusun oleh pesantren masing-masing, dalam bentuk kurikulum kepesantrenan.

Kurikulum kepesantrenan yang dibuat oleh pesantren masing-masing menurut peneliti, belumlah menggambarkan ciri khas pesantren pada aspek materinya. Materi diberikan secara parsial dengan tidak diikuti oleh program-program lainnya yang menunjang materi tersebut. Contoh kongkret yang dapat peneliti ungkapkan adalah, pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan di pesantren. Proses pembelajarannya diberikan tersendiri dan ketika proses belajar tersebut selesai, tidak diikuti dengan praktek langsung antar sesama santri atau antara santri dengan pembina di pesantren tersebut. Begitu pula dalam hal belajar bahasa Inggris. Faktor penyebab utama yang dapat peneliti kemukakan adalah berkaitan erat dengan kapasitas pembina yang tinggal di pesantren. Sebagian besar pembina yang tinggal di pesantren tidak menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga proses praktek bahasa tidak dapat berjalan dengan baik.

Solusi yang dapat peneliti kemukakan untuk mengantisipasi eksistensi kurikulum di pesantren Sulawesi Utara adalah:

- 1) Pihak pesantren terlebih dahulu harus merumuskan visi dan misinya sebagai acuan merumuskan tujuan pendidikan dan rumusan kurikulumnya.
- 2) Kurikulum yang telah disusun, harus diikuti dan ditunjang dengan berbagai aspek yang terkait, mulai dari pendidik hingga fasilitas yang mendukung pelaksanaan penerapan kurikulum tersebut.
- 3) Kurikulum kepesantrenan harus benar-benar mencerminkan identitas sebuah pesantren. Pesantren harus berani menyusun kurikulumnya dengan tidak terikat dengan kurikulum madrasah/sekolah yang ada. Jika perlu, perbandingan kurikulum madrasah/sekolah adalah 100% dan kurikulum kepesantrenan juga 100%. Dengan demikian, cita-cita pesantren untuk menjadikan lulusannya menguasai pengetahuan umum sekaligus ahli dalam bidang agama akan terpenuhi.
- 4) Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut harus senantiasa dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan dengan semua pihak yang terkait, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan inovasi dan pengembangan terhadap kurikulum tersebut.

d. Analisis dan Solusi Pendidik

Aspek pendidik pada pesantren sebagaimana dikemukakan oleh K.H. Sahal Mahfudz mengatakan bahwa jika pesantren ingin berhasil melakukan pengembangan masyarakat di sekelilingnya, maka pesantren harus melengkapi dirinya dengan tenaga terampil (*professional*). Peneliti mendukung pandangan tersebut, karena keberhasilan pesantren dan lembaga apapun yang mengelola pendidikan, sangat ditentukan oleh profesionalitas tenaga pendidiknya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan tenaga pendidik pada pesantren di Sulawesi Utara lebih didominasi dengan tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan umum dibandingkan dengan pendidik yang berlatar belakang pendidikan agama. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren di Sulawesi Utara belum sepenuhnya menjadikan pendidikan agama sebagai pendidikan unggulan dan merupakan ciri khas sebuah pesantren.

Tenaga pendidik pada pesantren di Sulawesi Utara sebagaimana telah digambarkan peneliti sebelumnya, memiliki latar belakang pendidikan umum lebih banyak dibandingkan dengan pendidik yang berlatar belakang pendidikan agama. Hanya ada satu pesantren yang memiliki perbandingan tenaga pendidik berlatar belakang pendidikan agama lebih banyak daripada tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan umum, yakni Pesantren Alkhairaat Bintauna, dengan jumlah tenaga pendidik berlatar belakang pendidikan agama sebanyak 28 orang atau 50,90%

dan tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan umum sebanyak 27 orang atau 49,09 %.

Analisis berdasarkan penerapan kurikulum yang diterapkan, yakni kurikulum sekolah umum dan madrasah, maka sewajarnya pendidik berlatar belakang pendidikan umum lebih banyak daripada pendidik yang berlatar belakang pendidikan agama. Namun jika pesantren memiliki visi yang tegas sebagai sebuah lembaga pendidikan keagamaan, pengalokasian mata pelajaran agama akan lebih besar atau minimal sama dengan mata pelajaran umum. Jika demikian halnya, maka akan sangat dibutuhkan tenaga pendidik yang berlatar belakang pendidikan agama dibandingkan pendidik yang berlatar belakang pendidikan umum.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan peneliti pada aspek tenaga pendidik ini adalah tempat tinggal tenaga pendidik tersebut. Tenaga pendidik pada pesantren, sebaiknya lebih banyak yang tinggal dalam pesantren, terutama pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan madrasah, daripada tinggal di luar pesantren. Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai dalam pesantren, akan semakin memudahkan mengorganisir seluruh rangkaian proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum terpadu.

Solusi atas permasalahan tenaga pendidik yang diungkapkan di atas, dapat peneliti kemukakan sebagai berikut:

- 1) Pesantren harus mampu merekrut tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan lembaga pendidikannya. Bila lembaga pendidikan yang diselenggarakan adalah lembaga pendidikan umum, maka tenaga pendidik berlatar belakang pendidikan umum harus lebih banyak yang direkrut, begitu pula sebaliknya, pesantren yang lebih banyak menyelenggarakan pendidikan agama, maka tenaga pendidik yang direkrut adalah tenaga pendidik berlatar belakang pendidikan agama pula.
- 2) Pesantren harus mampu mendorong dan meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya melalui pelatihan-pelatihan dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 3) Pesantren harus menyiapkan lebih banyak lagi tempat tinggal bagi para pendidik dalam pesantren, dan mengarahkan pendidiknya terutama yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan madrasah untuk tinggal dalam pesantren.

e. Analisis dan Solusi Peserta Didik

Aspek terakhir menyangkut sistem pendidikan pesantren adalah berkaitan dengan peserta didik. Zamakhsyari Dhofier menyebutkan santri dengan dua sebutan, yakni santri *mukim* dan santri *kalong*. Santri *mukim* adalah santri yang datang dari jauh dan menetap dalam kelompok pesantren, sementara santri *kalong* adalah santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren yang biasanya tidak menetap dalam

pesantren. Bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa keberadaan santri pada pesantren di Sulawesi Utara, lebih banyak sebagai santri *kalong* dibandingkan dengan santri *mukim*. Artinya, pandangan Zamakhsyari tersebut juga berlaku pada pesantren di Sulawesi Utara. Dengan demikian, temuan tersebut merupakan afiliasi dari pandangan Zamakhsyari tentang peserta didik/santri. Maka dalam hal ini, hasil temuan peneliti terkait dengan kekhususan peserta didik yang tinggal di pesantren merupakan dukungan serta pengembangan dari hasil temuan peneliti-peneliti terdahulu.

Realitas yang peneliti temukan terhadap keberadaan peserta didik atau santri di pesantren Sulawesi Utara menunjukkan bahwa lebih banyak yang tinggal di luar pesantren (santri kalong) dari pada yang tinggal di dalam pesantren (santri mukim). Hal ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, yakni hanya 1 pesantren saja yang memiliki santri mukim 100%, yakni Pesantren Lembaga Pendidikan Islam Pondok Karya Pembangunan (LPI-PKP) Manado, disusul dengan Pesantren Assalam Manado yang memiliki santri mukim 90,60% dan santri kalong hanya berjumlah 25 orang atau 9,39%.

Adapun Pesantren Alkhairaat Bintauna dan Pesantren Assalam Manado, lebih banyak memiliki santri kalong dari pada santri mukim. Hal ini merupakan faktor penghambat utama dalam menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum terpadu. Dengan lebih banyaknya santri yang tinggal di luar pesantren, pengelola dan pengasuh pesantren mengalami kesulitan menerapkan kurikulum kepesantrenannya, padahal penerapan kurikulum kepesantrenan merupakan suatu kelebihan dan menjadi ciri khas eksistensi pesantren.

Menurut pengamatan peneliti, setidaknya ada empat faktor yang menjadikan peserta didik pada pesantren di Sulawesi Utara enggan untuk tinggal dalam pesantren. Keempat faktor tersebut tidak menutup kemungkinan bertambah seiring dengan berkembangnya waktu. *Pertama*, tempat tinggal peserta didik yang berdekatan dengan pesantren. *Kedua*, kecenderungan peserta didik yang enggan untuk diatur dengan berbagai aturan, apalagi aturan tersebut sangat mengikat bagi mereka selama 1 kali 24 jam setiap harinya. *Ketiga*, pesantren di Sulawesi Utara belum semuanya menyiapkan fasilitas tempat tinggal dan program unggulan yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa pesantren Sulawesi Utara merupakan pilihan utama untuk anak-anak mereka. *Keempat*, posisi pesantren di Sulawesi Utara berada di tengah komunitas umat kristen/non-Muslim. Sebelum Gorontalo berpisah dan menjadi daerah otonom sendiri, masyarakat Muslim Sulawesi Utara terbilang cukup banyak dan dari daerah inilah input pesantren di Sulawesi Utara berasal. Setelah Gorontalo terpisah, maka input terhadap pesantren Sulawesi Utara sangat berpengaruh.

Solusi untuk masalah keberadaan santri kalong yang lebih banyak daripada santri mukim adalah:

- 1) Pihak pesantren harus lebih berani menentukan sikap untuk meningkatkan kualitas pesantrennya dengan menyiapkan asrama bagi seluruh santrinya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- 2) Pesantren harus memperhatikan fasilitas asrama agar santri menjadi betah tinggal di dalamnya.
- 3) Program kegiatan dalam asrama harus dirancang dengan baik, agar santri tidak merasa bosan dan jenuh mengikuti kegiatan pesantren.

Jika pesantren menginginkan kualitas pembelajarannya terjamin dengan baik, maka beberapa solusi yang ditawarkan oleh peneliti, kiranya menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya dapat digunakan bagi pengembangan pesantren tersebut.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap beberapa faktor penghambat tersebut dan didahului dengan mengungkapkan faktor pendukung pesantren di Sulawesi Utara, peneliti menemukan beberapa keunikan yang dimiliki pesantren di Sulawesi Utara.

Pertama, pesantren di Sulawesi Utara bukan hanya merupakan lembaga pendidikan keagamaan saja, namun merupakan salah satu lembaga dakwah di Sulawesi Utara. Dikatakan sebagai lembaga dakwah, karena disamping misi pendidikan, pesantren juga melakukan misi dakwah di tengah-tengah masyarakat Muslim Sulawesi Utara. Misi dakwah dimaksud dalam bentuk mengirimkan *ustāḥ* dan para santri untuk mengisi ceramah pada beberapa majelis taklim serta melakukan khutbah keliling pada setiap jumat. Kegiatan lainnya adalah dengan mengisi pengajian-pengajian al-Quran di rumah warga yang ditimpa musibah kedukaan, juga acara-acara hajatan keluarga lainnya.

Kedua, pesantren di Sulawesi Utara sekalipun berada di tengah-tengah masyarakat non-Muslim, namun hingga saat ini masih tetap eksis dan semakin menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Dari empat pesantren yang diteliti, belum pernah terjadi sejak berdiri hingga kini, ada satu pesantrenpun yang pernah ‘mati’ atau tidak lagi melakukan proses pembelajaran. Pesantren tersebut tetap eksis dengan berbagai kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya.

Ketiga, pesantren di Sulawesi Utara menerapkan kepemimpinan berbasis sistem, yakni pesantren tersebut menganut kepemimpinan kolektif dengan mengembangkan kepengurusan yayasan dan kepemilikannya pun bukan oleh satu atau dua orang saja seperti yang terjadi pada pesantren berbasis kiai. Ini bukan berarti bahwa pesantren tidak mengakomodir peran kiai, keberadaan kiai tetap dianggap sebagai figur yang paling berpengaruh terhadap pesantren tersebut. Implikasi dari penerapan sistem kepemimpinan berbasis sistem tersebut menjadikan peran pimpinan pesantren sebagai *top* manajer menjadi berkurang. Pimpinan pesantren di Sulawesi Utara seperti yang telah diungkapkan oleh peneliti sebelumnya, memiliki tipe kepemimpinan *laissez faire*,

yakni bentuk kepemimpinan yang lebih banyak mendelegasikan perannya kepada orang lain.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pesantren di Sulawesi Utara secara umum merupakan pesantren berbasis sistem, yakni pesantren yang menganut kepemimpinan kolektif dengan mengembangkan kepengurusan yayasan dan kepemilikannya merupakan kepemilikan kolektif. Masing-masing pesantren memiliki struktur organisasi dan sistem madrasah/sekolah yang telah berlangsung sejak didirikannya sekolah/madrasah tersebut. Sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara bersifat adaptif, yakni menggabungkan sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan modern.
- b. Faktor pendukung sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara terdiri dari: *pertama*, adanya dukungan masyarakat muslim Sulawesi Utara; *kedua*, adanya dukungan pemerintah; dan *ketiga* adanya kekuatan alumni. Adapun yang menjadi faktor penghambat sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara adalah; *pertama*, faktor kelembagaan dan keorganisasian. Kepemilikan secara bersama dan bukan pribadi, banyak menimbulkan masalah dalam penge-lolaannya diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap tugas masing-masing; *kedua*, faktor kepemimpinan. Tipologi kepemimpinan pesantren lebih di dominasi dengan tipe kepemimpinan *laissez faire*, yakni pimpinan pesantren lebih banyak mendelegasikan tugasnya kepada pembina-pembina lainnya di pesantren. Di samping itu pimpinan lebih banyak yang tinggal di luar pesantren; *ketiga*, faktor kurikulum, yakni kurikulum kepesantrenan yang belum mencerminkan ciri khas pesantrennya; *keempat*, faktor pendidik yang lebih banyak berlatar belakang pendidikan umum dan tinggal di luar pesantren; *kelima*, faktor peserta didik/santri yang kurang mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum kepesantrenan karena lebih banyak tinggal di luar pesantren.
- c. Solusi untuk mengantisipasi faktor penghambat sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara, terdiri dari: a. aspek kelembagaan dan keorganisasian, harus segera menyusun pembagian *job description* dengan jelas, sehingga tidak terjadi saling berharap dalam melaksanakan tugas. Pengurus yayasan disarankan oleh peneliti agar berasal dari unsur pesantren yang memiliki hubungan emosional yang kuat agar lebih memperhatikan pesantren yang dinaunginya; b. kepemimpinan. Pesantren harus sesegera mung-kin melakukan proses pengkaderan calon pemimpin dengan jalan menyiapkan fasilitas dan tempat untuk menggodok mereka. Cara lainnya adalah dengan memfasilitasi calon pemimpinnya untuk melakukan studi lanjut ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga calon pemimpin

tersebut diharapkan kelak memiliki kemampuan yang dapat diandalkan; c. kurikulum. Kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurikulum kepesantrenan yang harus segera dilakukan revisi dan inovasi agar lebih mencerminkan identitas lembaga pendidikan pesantrennya; d. pendidik. Pesantren harus lebih selektif lagi melakukan rekrutmen terhadap tenaga pendidikya. Hal ini dimaksudkan agar orientasi pendidikan yang akan dituju oleh pesantren sebagai lembaga keagamaan dapat berjalan dengan baik karena ditunjang oleh tenaga pendidik yang profesional; peserta didik. Pesantren sedapat mungkin menyiapkan fasilitas asrama yang baik serta program unggulan yang membuat peserta didik betah tinggal di pesantren. jika ini tidak dilakukan oleh pesantren, maka peserta didik akan lebih cenderung tinggal di luar pesantren dari pada tinggal dalam pesantren.

2. *Implikasi Penelitian*

Penelusuran terhadap sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara dengan mengungkapkan beberapa faktor pendukung dan penghambat sistem pendidikan pesantren di Sulawesi Utara berimplikasi pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek kelembagaan dan keorganisasian akan berjalan dengan baik dan harmonis, jika seluruh unsur kepengurusan yayasan dan pesantren memahami tugas dan fungsinya masing-masing dan bekerjasama untuk mencapai tujuan lembaga pendidikannya.
2. Kepemimpinan pada pesantren di Sulawesi Utara akan semakin baik, jika pesantren memperhatikan aspek pemimpin dengan melakukan pengkaderan secara kontinyu, sehingga kaderisasi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.
3. Kurikulum akan menjadi baik, jika disusun secara bersama-sama semua unsur yang terlibat dalam pesantren, termasuk *stakeholder* sebagai pengguna alumni pesantren, agar tercipta kurikulum yang mampu mengakomodir kebutuhan semua pihak dengan tidak meninggalkan eksistensi kepesantrenannya.
4. Pendidik akan semakin professional dalam menjalankan tugasnya, jika pengembangan potensi diri melalui pelatihan-pelatihan dan proses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dilakukan oleh para pendidik dan ditunjang oleh pihak lembaga pendidikan tempat ia mengabdikan dirinya.
5. Peserta didik/santri akan berkualitas jika unsur-unsur yang terkait dengan proses pembelajaran santri disiapkan dengan baik, mulai dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, H. Abu dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ali, H.A. Mukti. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Allen, Louis A. *The Management Profession*, terjemahan D.P.Tampubolon, Jakarta: Erlangga, 1964.
- Arifin, M. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Arsyad, Azhar. *Pokok-pokok Manajemen: Pengetahuan Praktis bagi Pemimpin dan Eksekutif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Atmodiwiro, Soebagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Ardadizya Jaya, 2001.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Ciputat: P.T. Logos Wacana Islam, 1999.
- Beane, James A. *et al. Curriculum Planning and Development*, United State of Amerika: McGraw-Hill Book Company, 1991.
- Bukhari, Mochtar. *Pendidikan dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Bush, Tony. *Theories of Educational Management*, London: Harper & Row Publishers, 1986.
- Charmaz, K. *Grounded Theory*, In Jonathan A. Smith (Ed). *Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods*, London: Sage Publications, 2006.
- Damopolii, Muljono. *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Danim, Sudarman. *Menjadi Komunitas Pembelajar: Kepemimpinan Transformasional dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- _____. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, Cet II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Naladana, 2004.

- Departemen Agama RI. *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Departemen Agama RI, 2006.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren*, Jakarta: Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepala Pondok Pesantren, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Cet. VI; Jakarta: LP3ES, 1994.
- Dirawat. *et al. Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. *Direktori Pesantren*, Jilid 2, Jakarta: t.p., 2007.
- El-Saha, M. Ishom. dan Haedari, H. Amin. *Manajemen Kependidikan Pesantren*, Jakarta: Transwacana, 2008.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Cet. I; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Fatah, H. Rohadi Abdul. *et al. Rekonstruksi Pesantren Masa Depan Dari Tradisional, Modern, Hingga Post Modern*, Cet. II; Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008.
- Filipo, Edwin B. *Manajemen Personalialia*, terj. M. Mas'ud, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Fossey, E. *et al. Understanding and Evaluating Qualitative Research*, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. *Journal*, Vol. 36, 2002.
- Gorton, Richard A. *School Administration*, American: WM.C. Brown Company Publisher, 1976.
- Haedari, H. Amin dan El-Saha, M. Ishom. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Cet. III; t.tp., Diva Pustaka, 2008.
- Halim, A. *et al.* (eds). *Manajemen Pesantren*, Cet. II; Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2009.
- Hallinger, Philip & Bridges, Edwin M. *A Problem-based Approach for Management Education: Preparing Managers for Action*, Netherland: Springer, 2007.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Hamid, Abu. "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

- Harsey, Paul & Blanced, Kenneth H. *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*, New Jersey: Prentice Hall, 1982.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Gunung Agung, 2001.
- Ihsan, H. Fuad. *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Jamali. “Kaum Santri dan Tantangan Kontemporer”, dalam Marzuki Wahid. et.al. (peny.), *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Jones. *School Finance: Technique and Sosial Policy*, London: Collier McMillan Pub., 1985.
- Kallinikos, Jannis. *Mapping the Intellectual Terrain of Management Education*, dalam Robert French and Christopher Grey (ed.), *Rethinking Management Education*, New Delhi: Sage Publications Ltd., 1996.
- Kantaprawira, Rusadi. *Aplikasi Pendekatan Sistem dalam Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Bunda Karya, 1987.
- Kaufman, Roger A. *Educational Sistem Planning*, Englewood Cliffs, NMJ: Prentice-Hall, Inc., 1972.
- Koontz, Harold. *et al. Management*, eighth edition, California: McGraw Hill-Inc, 1984.
- Laila, St. Noer Farida. *The Continuation of Traditional Religious Learning in Pesantren in Java; The Use of The Ta’lim al-Muta’allim*, Leiden University: t.p., 1998.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Dian Rakyat, t.th.
- Maimun, Agus dan Shodiq, Ahmad. *Madrasah Masa Depan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Manullang, M. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Cilia: 1992.
- Marno. *Islam By Management and Leadership, Tinjauan Teoretis dan Empiris Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2007.
- Mastuhu. “Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren”, *Disertasi*, Bogor: Fakultas Pascasarjana IPB, 1989.
- Masyhud, H.M. Sulthon dan Khusnurdilo, Moh. *Manajemen Pondok Pesantren*, Cet. III; Jakarta: Diva Pustaka, 2008.

- Moesa, Ali Maschan. *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*, Surabaya: LEPKISS, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Cet. I; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhaimin dan Mujib, Abdul. *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofi dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Cet. I; Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Muḥḍār, Husayn ‘Abd Allah. *Al-Jad³d fi al-Idārah al-Madrasiyyah*, Jeddah: Dār Al-Syurūq, 1406H.
- Mukti, Abdul. “Paradigma Pendidikan Pesantren: Ikhtiar Metodologis Menuju Minimalisasi Kekerasan Politik”, dalam Ismail SM., *et.al.*, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, 2002.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996.
- Musnamar, Tohari. *Bimbingan dan WawanwuruK sebagai Suatu Sistem*, Yogyakarta: Cendekia Sarana Informatika, 1985.
- Nahrawi, H. Amiruddin. *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Narayan, N.B. *Essence of Managerial Economics and Management Science*, New Delhi: Anmol Publications, 1977.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Nawawi, Hadari. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1989.
- Nisjar, Karhi dan Winardi. *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pidarta, Made. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, t.th.
- Rahardjo, M. Dawam. (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: P3M, 1985.

- Rama, H. Bahaking. *Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesantren: Kajian Pesantren As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan*, Jakarta: PT. Parodatama Wiragemilang, 2003.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Robbins, Stephen P. *Organizational Behavior*, New Jersey: Prentice Hall, 1987.
- Room, Muh. *Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pendidikan Islam*, Makassar: Yapma, 2010.
- Saksono, Slamet. *Administrasi Kepegawaian*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Sallis, E. *Total Quality Management in Education*, dalam Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Edisi Pertama, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Sharma, Jai Narain. *Human Resource Management*, New Delhi: Mittal Publications, 2002.
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1994.
- Stoner, James A. F. & Wankel, Charles. *Manajemen*, edisi ketiga, terj. Wilhelmus W. Bakowatun, Jakarta: CV. Intermedia, 1988.
- Sukamto. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Cet. I; Jakarta: Pustaka, LP3ES, 1999.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005.
- Syarif, A. Hamid. *Pengenalan Kurikulum Sekolah dan Madrasah*, Bandung: Citra Umbara, 1995.
- Syarif, Mustofa. *et al.*, *Administrasi Pesantren*, Jakarta: PT. Paryu Barkah, t.t.
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Terry, Georger R. *Principles of Management*, fifth edition, Homewood Illiounis, Richard D. Irwin Inc, 1978.
- Tilaar, H. A. R. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Tim Redaksi Fokusmedia. *Himpunan Peraturan Perundangan Standar Nasional Pendidikan*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahid, Abdurrahman. “Ulama Dulu Menyebabkan Daya Setempat”, dalam *Santri*, No. 02, Pebruari 1997.
- _____. *Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren*, Cet. III; Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Wahid, Marzuki. *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Wirosukarto, Amir Hamzah. *et al. K.H. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Cet. I; Ponorogo: Gontor Press, 1996.
- Woike, B. A. The State of the Story in Personality Psychology, Social and Personality Psychology Compass. *Journal*, Volume 2, 2008.
- Yappi, MU. *Manajemen Pengembangan Pondok Pesantren*, Cet. I; Jakarta: Media Nusantara, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1990.
- Zainuddin, H. Muhadi dan Mustaqim, Abd. *Studi Kepemimpinan Islam Telaah Normatif dan Historis*, Cet II; Semarang: Putra Mediatama Press, 2008.